

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN REFERENSI

- Abidin, Andi Zainal, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung : P.T Alumni.
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, *KORUPSI dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, 2010, "*Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia*", Malang : Banyumedia Publishing.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi (EDISI KEDUA)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama.
- Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2006, *Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*, Buku Panduan : Fakultas Hukum Unika Soegijapranata (tidak diterbitkan).
- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Wiyono, R., 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006.

Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957.

Peraturan Penguasa Perang Pusat A.D. No. PRT/Perpu/013/1958.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 42/K/Kr/1965.

SITUS INTERNET

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>

<http://www.indonesia.go.id/in/bumn>

<http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/10/29/mvfuh4-merpati-disuntik-mati-atau-transformasi>

www.rakyatmerdeka.co.id/eksekutif/hal/5/view/26/Hotasi-Nababan,-Presdir-Merpati-Nusantara-Airlines

<http://news.liputan6.com/read/2082158/kejagung-eksekusi-terpidana-kasus-korupsi-merpati-hotasi-nababan>

<http://kbbi.web.id/korupsi>.